

**ANALISIS FAKTOR PENGHAMBATPENERAPAN KEBIJAKAN  
SANITARY LANDFILL DI TPA JATIBARANG SEMARANG  
SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2008  
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

**Elli Yoana Susanti<sup>1</sup>, Drs. Suwanto Adhi, SU<sup>2</sup>, Dzunuwanus Ghulam  
Manar, S.IP, M.Si<sup>3</sup>**

[ellyyoana@gmail.com](mailto:ellyyoana@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Population grows significantly changing consumption pattern has increasing amount of waste in community that affect diversity of garbage in Semarang City. In order to diminish the amount of waste and prevent its detrimental effect on environment, the government issued Constitution Number 18 Year 2008 about Waste Management which elaborates mechanism of waste management, namely Sanitary Landfill. Since 1995, Sanitary Landfill has been applied in Jatibarang Landfill, Semarang, but nowadays implementation is not applied optimally as several problems found.*

*The purpose of this research is analyze inhibiting factors of the Sanitary Landfill's application in Jatibarang Landfill as well as issues in waste management in Semarang City. This research is a descriptive analytic research which uses a qualitative approach. Data collected through interviews with informants, direct observation in the study site, and documentation studies conducted on various documents relevant to this study.*

*The result shows that final processing of waste in the Jatibarang Landfill tend to use the Controlled Landfill system as Sanitary Landfill system cannot function properly. It is influenced by the separation of waste by resources has not worked well, increase in waste generation, budget realization has not be absorbed maximally, and weather factor.*

*Recommendations that can be given are raising public awareness of waste management through government programs, involving the Head of Neighborhood Unit in oversight of waste management, improvement of policy formulation of waste management in landfill, and maximized budget absorption by considering the scale of priority of waste problems.*

---

<sup>1</sup>Elli Yoana Susanti, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, ellyyoana@gmail.com

<sup>2</sup>Drs. Suwanto Adhi, SU, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

<sup>3</sup>Dzunuwanus Ghulam Manar, S.IP, M.Si, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

*Keywords: Inhibiting Factor, Sanitary Landfill, Waste Management*

## **ABSTRAKSI**

Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dan perubahan pola konsumsi masyarakat mengakibatkan meningkatnya jumlah produksi sampah di masyarakat serta berpengaruh pada jenis dan keberagaman sampah di Kota Semarang. Guna mengurangi jumlah timbulan beserta dampak negatifnya terhadap lingkungan, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang menjelaskan tentang mekanisme pengelolaan sampah dengan paradigma baru, yakni kebijakan *Sanitary Landfill*. Sistem pengelolaan sampah *Sanitary Landfill* telah diterapkan di TPA Jatibarang Semarang sejak tahun 1995, namun saat ini pelaksanaannya tidak berjalan secara maksimal karena ditemukan beberapa kendala dalam penerapannya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor penghambat penerapan *Sanitary Landfill* di TPA Jatibarang serta permasalahan yang muncul dalam pengelolaan sampah di Kota Semarang. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian jenis deskriptif analitik yang menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan berbagai informan, observasi langsung pada lokasi penelitian, dan kajian dokumentasi yang dilakukan terhadap berbagai dokumen yang relevan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemrosesan akhir sampah di TPA Jatibarang dalam prakteknya menggunakan sistem *Controlled Landfill* karena sistem *Sanitary Landfill* belum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut disebabkan oleh pemilahan sampah dari sumber belum berjalan dengan baik, peningkatan timbulan sampah, realisasi anggaran yang belum maksimal, serta faktor cuaca.

Rekomendasi yang dapat diberikan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah melalui program pemerintah, mengikutsertakan ketua RT dalam pengawasan, diadakan penyempurnaan rumusan kebijakan pengelolaan sampah di TPA, serta memaksimalkan penyerapan anggaran dengan mempertimbangkan skala prioritas permasalahan sampah.

---

<sup>1</sup>Elli Yoana Susanti, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, ellyyoana@gmail.com

<sup>2</sup>Drs. Suwanto Adhi, SU, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

<sup>3</sup>Dzunuwanus Ghulam Manar, S.IP, M.Si, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Kata Kunci: Faktor Penghambat, *Sanitary Landfill*, Pengelolaan Sampah

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Globalisasi ekonomi, politik dan budaya di era saat ini membuka jalan yang luas bagi negara-negara untuk saling berhubungan lebih erat. Selain itu, juga membawa dampak positif dan negatif bagi perkembangan suatu negara. Salah satu akibat yang nyata dari adanya globalisasi adalah berkembangnya pusat-pusat industri di perkotaan. Hal semacam inilah yang mengakibatkan laju pertumbuhan jumlah penduduk perkotaan menjadi tidak menentu. Sehubungan dengan meningkatnya jumlah penduduk di perkotaan secara otomatis membawa perubahan pada bertambahnya tingkat konsumsi, pola konsumsi, serta aktivitas masyarakat. Hal ini secara langsung dapat menimbulkan permasalahan baru khususnya bagi lingkungan. Salah satu masalah lingkungan yang seringkali menjadi perhatian publik maupun pemerintah adalah masalah sampah. Sampah yang ditimbulkan dari aktivitas dan konsumsi masyarakat kota seringkali sulit diatasi.

Secara umum di Indonesia terdapat dua proses pengelolaan sampah, yaitu *Sanitary Landfill* dan *Open Dumping*. *Sanitary Landfill* adalah sistem pengelolaan sampah dengan cara membuang dan menumpuk sampah ke suatu lokasi yang cekung, memadatkan sampah tersebut, kemudian menutupnya dengan tanah. Sedangkan *Open Dumping* adalah sistem pembuangan sampah dengan cara membuang sampah begitu saja di tanah lapang terbuka tempat pembuangan akhir tanpa adanya tindak lanjut sehingga dinilai dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih luas. Pemerintah sendiri telah mengeluarkan UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang mengatur tentang pengelolaan sampah terkait dengan perubahan paradigma pengelolaan sampah, pembagian kewenangan dan penyelenggaraannya. Undang-Undang ini mengamanatkan bahwa seluruh Pemerintah Kota/Kabupaten yang masih menggunakan TPA cara *Open Dumping* harus merencanakan penutupannya paling lama setahun sejak diberlakukannya UU tersebut dan harus menutup TPA jenis tersebut serta menggantinya dengan *landfill* yang lebih baik, yaitu yang dikenal sebagai *Sanitary Landfill* paling lama sejak berlakunya UU tersebut diundangkan.

Kota Semarang merupakan salah satu kota yang mempunyai permasalahan sampah sebagaimana kota-kota besar pada umumnya. Kota Semarang merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah dimana mempunyai jumlah penduduk yang cukup padat serta mengalami

---

<sup>1</sup>Elli Yoana Susanti, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, ellyyoana@gmail.com

<sup>2</sup>Drs. Suwanto Adhi, SU, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

<sup>3</sup>Dzunuwanus Ghulam Manar, S.IP, M.Si, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2011, penduduk Kota Semarang berjumlah 1.544.358 jiwa, kemudian meningkat pada tahun 2012 menjadi 1.559.198 jiwa, dan mengalami peningkatan kembali menjadi 1.572.105 jiwa pada tahun 2013 (BPS, 2013), sehingga tidak heran jika jumlah sampah yang dihasilkan perharinya terhitung cukup besar. Berdasarkan data, tahun 2011 volume sampah yang dihasilkan di Kota Semarang adalah 4679 m<sup>3</sup>, sementara jumlah sampah yang terangkut ke TPA sebanyak 3679 m<sup>3</sup>. Pada tahun 2012 produksi sampah meningkat menjadi 4757,1 m<sup>3</sup>, sementara yang terangkut ke TPA sebanyak 3858 m<sup>3</sup>, dan pada tahun 2013 adalah sebanyak 4836,3 m<sup>3</sup>, dan jumlah terangkut sebanyak 4014 m<sup>3</sup>. Hal tersebut memperlihatkan bahwa TPA masih harus menampung sebagian besar jumlah sampah yang terbuang ke TPA setiap harinya.

Saat ini Kota Semarang telah menerapkan sistem *Sanitary Landfill* dalam pengelolaan sampahnya. Sebenarnya Kota Semarang sudah lama mengenal sistem pengelolaan sampah *Sanitary Landfill* tersebut, namun dalam prakteknya masih menggunakan sistem *Controlled Landfill*, yaitu metode *landfill* dimana TPA belum dapat melaksanakan metode *Sanitary Landfill* seutuhnya. Mengingat jumlah produksi sampah yang dihasilkan tiap harinya masih menunjukkan angka yang tinggi serta dampak yang dapat ditimbulkan dari tumpukan sampah, maka Pemerintah Kota Semarang harus segera melakukan perbaikan dalam pengelolaan sampah secara menyeluruh.

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penanganan sampah di TPA Jatibarang Semarang berkaitan dengan peranan dari Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang dengan penerapan sistem *Sanitary Landfill* dengan judul “Faktor Penghambat Penerapan Kebijakan *Sanitary Landfill* di TPA Jatibarang Semarang sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah”.

## KERANGKA TEORI

### Manajemen Pemerintahan

Suradinata (1998:14) mendefinisikan manajemen pemerintahan sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan negara dengan menggunakan berbagai sumber yang dikuasai oleh negara.

Sementara itu Lynn dalam Waluyo (2007:120) menjelaskan bahwa manajemen pemerintahan yang baik dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari proses dan hasilnya. Manajemen

<sup>1</sup>Elli Yoana Susanti, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, ellyyoana@gmail.com

<sup>2</sup>Drs. Suwanto Adhi, SU, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

<sup>3</sup>Dzunuwanus Ghulam Manar, S.IP, M.Si, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

pemerintahan sebagai proses, harus mengutamakan proses yang demokratis di atas segala rencana dan tujuan yang telah ditentukan, sedangkan manajemen pemerintahan sebagai hasil akan menggambarkan kesungguhan hati, pemakaian secara efisien akan sumber-sumber yang terbatas dengan mengutamakan administrasi yang baik di atas proses yang ada.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analitik. Peneliti mengumpulkan fakta terkait permasalahan sampah di TPA Jatibarang serta mempelajari hambatan-hambatan yang ada dengan acuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

### **HASIL PENELITIAN**

*Sanitary Landfill* adalah sistem pemusnahan sampah yang paling baik. Dalam metode ini, pemusnahan sampah dilakukan dengan cara menimbun sampah dengan tanah yang dilakukan selapis demi selapis. Dengan demikian, sampah tidak berada di ruang terbuka dan dampak negatif yang ditimbulkan sampah dapat diminimalisir.

Pengelolaan sampah telah diatur pemerintah melalui UU 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pemerintah melalui undang-undang tersebut memberi ruang yang cukup banyak bagi pemerintah provinsi, kota/kabupaten untuk merencanakan dan mengelola sampah dalam kewasannya. Kendati kewenangan itu telah terdistribusikan, namun tidak serta merta penanganan sampah menjadi mudah. Kondisi pengelolaan sampah di Indonesia masih tampak berantakan.

Tahap terakhir dari penanganan sampah yang biasa dijumpai di Indonesia adalah dilaksanakan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Pada umumnya, pemrosesan akhir sampah yang dilakukan di TPA adalah berupa proses pengurugan (*landfilling*). Hingga saat ini, sebagian besar daerah di Indonesia masih menggunakan metode *Open Dumping* dalam pemrosesan akhir sampahnya. Metode *Sanitary Landfill* merupakan metode terbaik dibandingkan dengan metode *landfill* lainnya, terlebih lagi jika dibandingkan dengan *Open Dumping* dalam hal penanggulangan dampak negatif sampah terhadap lingkungan. Cara *Open Dumping* sangat tidak dianjurkan karena sangat merugikan terhadap lingkungan sekitarnya, terutama dalam hal pencemaran. Perbandingan inilah yang menjadi latar belakang bahwa seluruh tempat pemrosesan akhir di Indonesia diwajibkan untuk memberbaharui sistem penanganan sampahnya menjadi *Sanitary Landfill*.

---

<sup>1</sup>Elli Yoana Susanti, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, ellyyoana@gmail.com

<sup>2</sup>Drs. Suwanto Adhi, SU, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

<sup>3</sup>Dzunuwanus Ghulam Manar, S.IP, M.Si, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

## 1. Penerapan *Sanitary Landfill* di Kota Semarang

Kota Semarang merupakan salah satu kota yang menerapkan metode *landfilling* sebagai metode pemrosesan akhir sampah di TPA. Sampah dari Kota Semarang, baik sampah organik maupun sampah an-organik, bahkan sampah B3 (Bahan Buangan Berbahaya), dibuang ke TPA Jatibarang. Sistem pengelolaan sampah di TPA Jatibarang awalnya (1991-1993) menggunakan sistem *Open Dumping*, yaitu dengan membuang sampah begitu saja ke lokasi TPA. Kemudian pada tahun 1993-1994 pengelolaan sampah ditingkatkan dengan menggunakan sistem *Controlled Landfill*, yaitu dengan melakukan pengaturan penumpukan sampah yang sesuai dengan syarat teknis SNI mengenai TPA sampah. Pada bulan Maret tahun 1995 pengelolaan sampah ditingkatkan kembali menjadi sistem *Sanitary Landfill*, yaitu sistem pengelolaan yang digunakan TPA sampai sekarang.

## 2. Permasalahan Pengelolaan Persampahan di Kota Semarang dalam Upaya Penerapan *Sanitary Landfill*

Permasalahan yang sangat mendasar bagi pengelolaan sampah di Kota Semarang adalah besarnya jumlah timbulan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Pada kenyataannya pola pembuangan sampah di Kota Semarang masih menganut konsep *end-of-pipe* pengelolaan lingkungan yang terkonsentrasi pada upaya pengolahan dan pembuangan limbah, sedangkan dalam UU 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah disebutkan bahwa penanganan sampah harus dilakukan dari sumber penghasil sampah.

### a. Perencanaan

#### 1. Kebijakan

Landasan hukum tentang pengelolaan sampah di Kota Semarang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang No. 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Persampahan dan telah diperbarui menyesuaikan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang terbit pada tanggal 7 Maret 2008. Secara umum, dalam undang-undang tersebut diatur mengenai hak dan kewajiban pemerintah dan masyarakat, garis besar pengelolaan sampah, hubungan pemerintah dengan masyarakat dan badan usaha, serta acuan pembiayaan, kompensasi, dan sanksi. Dalam kaitannya dengan kebijakan *Sanitary Landfill*, telah disebutkan dengan jelas pada ~~pasal 44 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah bahwa:~~

<sup>1</sup>Elli Yoana Susanti, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, ellyyoana@gmail.com

<sup>2</sup>Drs. Suwanto Adhi, SU, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

<sup>3</sup>Dzunuwanus Ghulam Manar, S.IP, M.Si, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

- 1) Pemerintah daerah harus membuat perencanaan penutupan tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini.
- 2) Pemerintah daerah harus menutup tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini.

Dalam hal ini, pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang telah mengetahui dan mengerti akan aturan hukum yang menjadi pedoman atau dasar dari kebijakan pengelolaan sampah tersebut.

## 2. Anggaran

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan sampah di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) sampah di TPA Jatibarang dengan sistem *sanitary landfill*, DKP sendiri telah menguraikan kegiatan-kegiatan yang pada dasarnya adalah menambah sarana dan prasarana kebersihan dengan anggaran yang ada sebagai pendukung kegiatan *sanitary landfill* melalui Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan di TPA Jatibarang dengan rincian sebagai berikut:

---

## APBD Perubahan DKP Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

---

<sup>1</sup>Elli Yoana Susanti, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, ellyyoana@gmail.com

<sup>2</sup>Drs. Suwanto Adhi, SU, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

<sup>3</sup>Dzunuwanus Ghulam Manar, S.IP, M.Si, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

NO.	SKPD/URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PRESEN TASE (%)
1.	Studi Kelayakan TPA Jatibarang	380.000.000	0	0%
2.	Pengadaan Kontainer Sampah	1.186.000.000	1.096.892.000	92,49%
3.	Pengadaan Truk Amroll	1.825.000.000	1.823.998.000	99,88%
4.	Pemeliharaan TPA Jatibarang	470.648.000	467.606.000	99,35%
5.	Peningkatan Sarana dan Prasarana TPA Jatibarang	10.243.000.000	4.700.621.875	45,89%
6.	Mesin Pemecah Sampah	185.000.000	173.903.000	94,00%
	Total Anggaran	14.289.648.000	8.263.020.875	

Sumber: APBD Perubahan Kota Semarang Tahun Anggaran 2015

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa terdapat realisasi anggaran belum terealisasi dengan maksimal yaitu:

1) Program Studi Kelayakan TPA di Kota Semarang

Tidak terelisasinya alokasi anggaran untuk program ini dikarenakan lahan TPA seluas 30 ha telah dibeli oleh pihak lain.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana TPA Jatibarang

Dari keseluruhan jumlah anggaran yang dialokasikan untuk program peningkatan sarana dan prasarana TPA sebesar Rp. 10.243.000.000, hanya Rp. 4.700.621.875 yang terealisasikan yang disebabkan oleh belum adanya *review* DED sesuai dengan kondisi lapangan terbaru sehingga pembangunan IPAL *leachate* dibatalkan.

---

### 3. Prosedur

<sup>1</sup>Elli Yoana Susanti, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, ellyyoana@gmail.com

<sup>2</sup>Drs. Suwanto Adhi, SU, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

<sup>3</sup>Dzunuwanus Ghulam Manar, S.IP, M.Si, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

TPA Jatibarang sendiri merupakan tempat yang tepat untuk melakukan *Sanitary Landfill* untuk wilayah Kota Semarang, prosedur yang dilakukan oleh Dinas dalam hal ini merupakan penanggung jawab tertinggi sudah benar dilakukan pertama yaitu truk mengambil muatan sampah yang berasal dari sumber sampah, kemudian di timbang berat muatannya di jembatan timbang, setelah itu truk membuang di area yang sudah ditentukan, kemudian sampah diimbun di cekungan tanah yang kemudian diurug dengan tanah dan diratakan menggunakan alat berat. Pengurugan ini dilakukan setiap hari apabila tidak ada kendala hujan.

#### **b. Pengorganisasian**

Salah satu hambatan kegiatan pengelolaan sampah di TPA adalah masalah sumber daya manusia yang disebabkan oleh adanya tenaga lapangan yang pensiun tanpa ada tenaga pengganti. Sementara itu, secara operasional kegiatan *landfilling* dengan sistem *Sanitary Landfill* harus dilakukan setiap hari yang dalam hal ini berarti bahwa kebutuhan SDM yang memadai akan sangat berpengaruh terhadap kegiatan pengelolaan sampah di TPA. Disamping itu, dengan jumlah sampah yang terus meningkat, secara otomatis sumber daya dan alur kerja organisasi dalam Dinas Kebersihan dan Pertamanan harus semakin diperbaiki. Bagaimana pun *Sanitary Landfill* merupakan proses yang tidak mudah. Oleh karena itu dibutuhkan orang yang ahli dan alat yang memadai untuk mengoptimalkan prosedur ini.

#### **c. Penggerakan**

Proses *landfilling* yang dilakukan di TPA Jatibarang sebenarnya telah dilakukan secara rutin setiap harinya sesuai dengan kriteria penerapan *Sanitary Landfill*. Sarana dan prasarana yang dimiliki juga telah dimanfaatkan dengan baik. Namun pada kenyataannya *landfilling* yang diterapkan di TPA Jatibarang belum dapat disebut sebagai *Sanitary Landfill* murni karena masih mempunyai kekurangan dalam hal teknis, sehingga *landfilling* yang digunakan masih tergolong sebagai metode *Controlled Landfill*.

#### **d. Pengawasan**

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas di TPA dilakukan setiap tiga bulan sekali. Selain itu, untuk evaluasi pertahun mengenai kondisi sistem pengelolaan sampah telah berjalan. Evaluasi tersebut dilakukan oleh Pemerintah Provinsi melalui tim ~~pengawas dan evaluasi yang terdiri dari kurang lebih empat orang. Tidak hanya evaluasi~~

---

<sup>1</sup>Elli Yoana Susanti, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, ellyyoana@gmail.com

<sup>2</sup>Drs. Suwanto Adhi, SU, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

<sup>3</sup>Dzunuwanus Ghulam Manar, S.IP, M.Si, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

dan pengawasan secara operasional, namun pengawasan juga dilakukan oleh BPK dalam hal pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.

### 3. Hambatan dalam Pengelolaan Sampah di TPA Jatibarang

Berdasarkan permasalahan-permasalahan pengelolaan sampah di TPA yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, dapat diketahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam penerapan metode *Sanitary Landfill* di TPA Jatibarang sesuai dengan aspek-aspek terkait, antara lain:

- Secara hukum:
  - Belum ada peraturan pemerintah yang spesifik untuk panduan pelaksanaan konstruksi dan operasional penerapan *Sanitary Landfill*
  - Kriteria TPA *Controlled Landfill* atau *Sanitary Landfill* belum jelas
  - Belum ada aturan rinci tentang kelembagaan dan pembiayaan TPA
  - Belum ada aturan tentang penggunaan bahan alternatif penutup sampah di TPA selain tanah
- Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang memiliki permasalahan di indikator sumber daya manusia ini dikarenakan terbatasnya sumber daya lapangan mengakibatkan sulitnya memenuhi kebutuhan pengelolaan sampah dengan volume yang besar.
- Peningkatan timbulan sampah tidak sebanding dengan kualitas dan tingkat pengelolaan persampahan yang masih rendah
- Dari segi pembiayaan, penerapan *Sanitary Landfill* membutuhkan biaya yang besar terlebih lagi pada pengadaan teknisnya. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa jumlah anggaran yang dialokasikan untuk TPA Jatibarang adalah mencukupi secara operasional.
- Hambatan lain juga datang dari komponen masyarakat, yaitu Tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat masih sangat rendah dan Keberlanjutan usaha daur ulang dan pengomposan masih rendah.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

---

<sup>1</sup>Elli Yoana Susanti, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, ellyyoana@gmail.com

<sup>2</sup>Drs. Suwanto Adhi, SU, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

<sup>3</sup>Dzunuwanus Ghulam Manar, S.IP, M.Si, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

1. Pada kenyataannya, sistem *Sanitary Landfill* telah diterapkan di TPA Jatibarang sejak tahun 1995, namun seiring dengan berjalannya waktu, terdapat kendala yang menghambat pelaksanaan *Sanitary Landfill* untuk dapat dilakukan sebagaimana mestinya.
2. Jumlah produksi sampah masih tinggi yang disebabkan oleh implementasi kebijakan 3 R yang tidak berjalan dengan baik, kepedulian masyarakat terhadap sampah yang masih rendah, serta sarana prasarana yang masih perlu untuk ditingkatkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas
3. Anggaran yang tersedia yang dialokasikan untuk program-program yang berkaitan dengan pengelolaan sampah tidak direalisasikan secara maksima
4. Meskipun pengawasan telah dilakukan, namun masih banyak terjadi pelanggaran atau permasalahan dalam kaitannya dengan pengelolaan sampah
5. Kurangnya SDM sebagai tenaga lapanga
6. Faktor cuaca sangat mempengaruhi proses *landfilling*

## **B. Saran**

1. Kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah perlu ditingkatkan melalui program pemerintah
2. Dalam implementasi program-program pemerintah, dinas maupun pihak terkait diharapkan untuk dapat melibatkan ketua Rukun Tetangga (RT) dalam melakukan pengawasan.
3. Perlunya diadakan penyempurnaan rumusan kebijakan pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), sehingga terdapat konsistensi kebijakan yang dapat diimplementasikan secara maksimal.
4. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang perlu memperhatikan skala prioritas permasalahan

## **DAFTAR PUSTAKA**

Andrianto, Waluyo. 2007. *Manajemen Publik. Konsep, Aplikasi & Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.

---

<sup>1</sup>Elli Yoana Susanti, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, ellyyoana@gmail.com

<sup>2</sup>Drs. Suwanto Adhi, SU, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

<sup>3</sup>Dzunuwanus Ghulam Manar, S.IP, M.Si, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

- 
- ErmayaSuradinata. 1998. *Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Bandung: Ramadan
- Handayaniingrat, Soewarno. 1995. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Hasan, M. I. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hasibuan, Malayu, S. P. 1995. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Dasar dan Kunci Keberhasilan*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Manik, K. E. 2003. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Djambatan.
- Milles, Matthew B., & Huberman, A. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Mubarak, W. I., & Chayatin, N. 2009. *Ilmu Kesehatan Masyarakat Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Medika.
- Salam, Dharma Setyawan. 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Djambatan.
- Sejati, K. 2009. *Pengolahan Sampah Terpadu*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sudrajat, H. R. 2009. *Mengelola Sampah Kota*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Suprihatin, A. 1999. *Panduan Pengelolaan Sampah*. Malang: PPPGT/VEDC Malang dan Swisscontact.
- Syafe'ie, Inu Kencana. 2003. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT. Rafika Aditama.
- Wahab, Saleh. 1989. *ManajemenKepariwisata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Widyatmoko, H., & Moerdjoko, Santorini. 2002. *Menghindari Mengolah dan Menyingkirkan Sampah*. Jakarta: Abdi Tandır.

---

## **REGULASI**

<sup>1</sup>Elli Yoana Susanti, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, ellyyoana@gmail.com

<sup>2</sup>Drs. Suwanto Adhi, SU, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

<sup>3</sup>Dzunuwanus Ghulam Manar, S.IP, M.Si, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

### **MEDIA INTERNET**

Hermawan. 2005. Hubungan antara tingkat pendidikan dan persepsi dengan Perilaku ibu rumah tangga dalam pemeliharaan kebersihan lingkungan.

*Bumi Lestari Journal of Environment* 5(2): 1. Tersedia pada: <http://ojs.unud.ac.id>. Diakses pada 28 November 2015 pukul 21:28 WIB

Gandes, dkk. 2013. Perencanaan Sistem Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kuningan. *Jurnal Konstruksi* 1(2): 93. Tersedia pada: <http://e-journal.unswagati-crb.ac.id> Diakses pada 15 Februari 2016 pukul 23:09 WIB

Setiawan. 2012. Pengelolaan Sampah. Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota FTSP – ITS hal. 42. Tersedia pada: <http://share.its.ac.id> Diakses pada 24 Maret 2016 pukul 12:23 WIB

<http://semarangkota.bps.go.id> Diakses pada 28 April 2016 pukul 21:15 WIB

<http://www.suaramerdeka.com> Diakses pada 24 Februari 2015 pukul 22:47 WIB

<http://beritajateng.net> Diakses pada 24 Februari 2015 pukul 19:20 WIB

---

<sup>1</sup>Elli Yoana Susanti, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, [ellyyoana@gmail.com](mailto:ellyyoana@gmail.com)

<sup>2</sup>Drs. Suwanto Adhi, SU, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

<sup>3</sup>Dzunuwanus Ghulam Manar, S.IP, M.Si, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro